



DINAMIKA STRATEGI HEDGING INDONESIA DALAM MENGHADAPI POLARISASI GEOPOLITIK AS-TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK: MENAKAR BATAS OTONOMI STRATEGIS DAN SENTRALITAS ASEAN

¹Pramudita Cahya Ningrum

¹Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama

¹Jl. Kamal Raya No.2a, RT.11/RW.8, Cengkareng Barat, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Email:Pramudita@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Desember 2024

Revised

21 Desember 2024

Accepted

01 Januari 2025

Kata Kunci: Hedging, Polarisasi Indo-Pasifik, Rivalitas AS-Tiongkok, Otonomi Strategis, Sentralitas ASEAN, Politik Luar Negeri Bebas-Aktif.

Keywords: Hedging, Indo-Pacific Polarization, US-China Rivalry, Strategic Autonomy, ASEAN Centrality, Independent and Active Foreign Policy.

Abstrak

Eskalasi rivalitas hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo-Pasifik menjebak negara-negara berkembang Asia Tenggara dalam pusaran polarisasi keamanan dan geoekonomi. Menolak keberpihakan biner antara aliansi minilateral Barat (AUKUS dan Quad) dan inisiatif Belt and Road Tiongkok, Indonesia mengadopsi strategi hedging (lindung nilai) guna mempertahankan otonomi strategis serta menjaga sentralitas ASEAN. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-eksplanatif dengan kerangka hedging Cheng-Chwee Kuik, Neorealisme Struktural, dan Konstruktivisme, studi ini menganalisis portofolio kebijakan luar negeri Indonesia periode 2014–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi hedging Indonesia dioperasionalkan melalui empat pilar simultan: pragmatisme ekonomi penyerapan investasi Tiongkok, diversifikasi kemitraan institusional dengan blok Barat (IPEF dan akses OECD), modernisasi pertahanan maritim (indirect balancing) di Laut Natuna Utara, serta proyeksi kepemimpinan normatif melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Kendati demikian, efektivitas strategi ini dibatasi oleh friksi koordinasi elite domestik, agresivitas taktik zona abu-abu Tiongkok di ZEE Natuna, dan melemahnya kohesi internal ASEAN. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan otonomi strategis Indonesia menuntut unifikasi kelembagaan keamanan maritim domestik dan penguatan industri pertahanan nasional yang mandiri.

Abstract

The intensifying hegemonic rivalry between the United States and China in the Indo-Pacific has entangled Southeast Asian states in geopolitical and geo-economic polarization. Rejecting binary alignments between Western minilateral alliances (AUKUS and Quad) and China's Belt and Road Initiative, Indonesia has enacted a strategic hedging posture to safeguard strategic autonomy and uphold ASEAN centrality. Employing a qualitative descriptive-explanatory method grounded in Cheng-Chwee Kuik's hedging framework, Structural Neorealism, and Constructivism, this study investigates Indonesia's foreign policy trajectory from 2014 to 2024. The findings reveal that Indonesia's hedging operates across four concurrent pillars: economic pragmatism through Chinese investment absorption, institutional diversification with Western partners (IPEF and OECD accession), defensive maritime modernization (indirect balancing) in the North Natuna Sea, and normative leadership via the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). However, the efficacy of this posture is increasingly constrained by domestic elite policy fragmentation, Beijing's persistent gray-zone maneuvers in the Natuna EEZ, and eroding ASEAN internal cohesion. This article concludes that preserving Indonesia's strategic autonomy necessitates domestic maritime governance unification and sovereign defense industrial capability.

PENDAHULUAN

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, dinamika politik internasional menyaksikan pergeseran tektonik yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana episentrum gravitasi kekuasaan global secara definitif beralih dari kawasan Atlantik Utara menuju bentangan luas kawasan Indo-Pasifik. Wilayah maritim yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ini bukan sekadar jalur perdagangan tersibuk yang memfasilitasi lebih dari sepertiga lalu lintas maritim dunia, melainkan telah menjelma menjadi palagan utama kontestasi hegemoni antara kekuatan adidaya petahana (incumbent superpower), Amerika Serikat, dan kekuatan adidaya penantang yang tengah bangkit dengan pesat (rising revisionist power), Republik Rakyat Tiongkok. Transisi kekuasaan (power transition) ini telah memicu perdebatan eksistensial mengenai masa depan tatanan internasional berbasis aturan (rules-based international order), sekaligus menghidupkan kembali bayang-bayang Perangkap Thucydides (Thucydides's Trap) di mana gesekan struktural antara kekuatan dominan dan kekuatan penantang hampir tak terhindarkan menghasilkan ketegangan keamanan yang meruncing (Allison, 2017; Mearsheimer, 2019).

Dalam lanskap strategis yang kian bergejolak ini, Asia Tenggara menempati posisi geografis dan geopolitik yang sangat rentan. Terletak tepat di persimpangan dua samudra dan diapit oleh kekuatan-kekuatan raksasa, kawasan ini menghadapi tekanan struktural yang memaksa para pembuat kebijakan untuk menavigasi dilema keamanan yang sangat rumit. Di satu kutub, Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping telah memproyeksikan pengaruh geoekonomi dan maritimnya secara ekspansif melalui inisiatif megah Belt and Road Initiative (BRI) yang menanamkan ratusan miliar dolar modal infrastruktur ke berbagai pelosok Asia Tenggara, sembari secara simultan menegaskan klaim historis sepihak atas hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan melalui batas demarkasi sepuluh garis putus-putus (ten-dash line). Di kutub seberang, Amerika Serikat merespons kebangkitan tersebut dengan menggelar doktrin pertahanan Free and Open Indo-Pacific (FOIP), merajut kembali aliansi militer bilateral tradisional hub-and-spoke, serta memelopori pembentukan arsitektur keamanan minilateral eksklusif seperti kemitraan teknologi militer AUKUS bersama Australia dan Britania Raya, serta forum dialog keamanan Quadrilateral Security Dialogue (Quad) bersama Jepang, India, dan Australia (Medeiros, 2020; Laksmana, 2021).

Bagi Indonesia, realitas bipolaritas asimetris ini menghadirkan tantangan paling berat terhadap tradisi diplomatik dan filosofi pertahanan nasionalnya sejak berakhirnya Perang Dingin. Sebagai negara kepulauan terbesar di planet bumi yang mengendalikan choke-points maritim vital dunia—seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)—Indonesia secara inheren berada di garis depan kalkulasi pertahanan kekuatan-kekuatan besar. Posisi strategis ini diperkuat oleh peran historis Indonesia sebagai pemimpin alamiah (primus inter pares) di dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Ketika persaingan adidaya kian mengarah pada pembentukan blok-blok pertahanan yang tertutup, Indonesia dituntut untuk mengambil sikap: apakah akan membiarkan dirinya ditarik ke dalam orbit keamanan salah satu adidaya, ataukah merumuskan sebuah arsitektur manuver yang memungkinkan negara kepulauan ini menjaga kedaulatannya tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan integritas wilayahnya.

Secara filosofis, kompas kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa berakar pada doktrin "Bebas dan Aktif" yang diletakkan pertama kali oleh Mohammad Hatta pada September 1948 melalui pidato monumentalnya yang bertajuk Mendayung di Antara Dua Karang. Hatta menegaskan bahwa posisi Indonesia bukanlah menjadi pion pasif atau objek tarikan antara dua blok kekuatan adidaya yang sedang berseteru, melainkan subjek independen yang aktif mendayung perahunya sendiri berdasarkan kepentingan nasional dan cita-cita perdamaian abadi (Hatta, 1948). Doktrin ini bukanlah sebuah manifesto isolasionisme atau netralitas pasif yang memisahkan diri dari dinamika global, melainkan mandat moral dan politis untuk senantiasa mandiri dalam menentukan sikap (freedom of action) serta secara proaktif meredakan ketegangan internasional demi terciptanya tatanan dunia yang adil dan beradab. Akan tetapi, di tengah konstelasi abad ke-21 yang diwarnai oleh peperangan teknologi informasi tingkat tinggi, disrupsi rantai pasok global, infiltrasi operasi zona abu-abu maritim, serta persaingan senjata hipersonik dan kapal selam bertenaga nuklir, doktrin Bebas-Aktif tidak lagi memadai jika hanya dipahami sebagai retorika moral semata. Doktrin tersebut memerlukan operasionalisasi strategis yang canggih, terukur, dan adaptif terhadap realitas distribusi kekuatan material yang keras.

Dalam khazanah teoretis Hubungan Internasional, respons negara-negara berkekuatan menengah (*middle powers*) atau negara-negara berkembang terhadap kompetisi kekuatan besar secara tradisional dikotomi oleh teori Neorealisme Struktural ke dalam dua kutub ekstrem: penyeimbangan (*balancing*) atau pengekoran (*bandwagoning*) (Waltz, 1979; Schweller, 1994). Pandangan neorealis klasik mengasumsikan bahwa di bawah sistem internasional yang anarkis, sebuah negara yang menghadapi kebangkitan kekuatan hegemonik hanya memiliki dua pilihan rasional: membangun aliansi militer penyeimbang untuk menangkal ancaman tersebut, atau menyerah pada kekuatan dominan dengan menjadi pengikut setia demi meraih jaminan keselamatan jangka pendek. Namun demikian, para sarjana studi kawasan Asia Tenggara berargumen secara meyakinkan bahwa dikotomi biner neorealisme tersebut gagal mencerminkan kompleksitas empiris perilaku negara-negara di kawasan ini (Goh, 2005; Acharya, 2014). Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tidak melihat realitas internasional semata-mata dalam warna hitam dan putih. Menghadapi Tiongkok dan Amerika Serikat, mereka tidak melakukan aliansi militer terbuka (*hard balancing*) yang dapat memicu permusuhan langsung, tetapi mereka juga menolak tunduk sepenuhnya (*bandwagoning*) yang akan merenggut otonomi kedaulatan mereka.

Untuk menjembatani anomali teoretis tersebut, sarjana terkemuka Cheng-Chwee Kuik (2008, 2016) mengembangkan teori *Hedging* dalam hubungan internasional. Kuik mengonseptualisasikan *hedging* sebagai seperangkat perilaku strategis di mana suatu negara secara sadar menolak komitmen biner permanen terhadap salah satu kekuatan besar, melainkan menyusun portofolio kebijakan yang saling mengimbangi risiko (*risk-offsetting behavior*). Tujuan fundamental dari strategi ini adalah memaksimalkan keuntungan ekonomi dan diplomatik jangka pendek di saat kondisi damai, sembari secara simultan mempersiapkan jaring pengaman strategis (*strategic fallback position*) guna memitigasi ketidakpastian dan potensi ancaman eksistensial di masa depan. Dalam taksonomi Kuik, *hedging* dioperasionalkan melalui spektrum tindakan terpadu yang mencakup pragmatisme ekonomi (*economic pragmatism*), pelibatan institusional multilateral (*binding-engagement*), penyeimbangan tidak langsung dan terbatas (*indirect balancing*), serta penolakan hegemoni sepihak (*dominance-denial*).

Selain kerangka kalkulasi materialistik Kuik, pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan luar negeri Indonesia membutuhkan kehadiran lensa Konstruktivisme Sosial (Wendt, 1999). Konstruktivisme mengingatkan bahwa keputusan strategis sebuah negara tidak pernah lahir dalam ruang hampa kalkulasi biaya-manfaat semata, melainkan dibentuk oleh identitas nasional, memori kolektif sejarah kolonialisme, serta norma-norma yang diyakini bersama. Dalam konteks Indonesia, identitas sebagai negara non-blok dan komitmen mendalam terhadap sentralitas ASEAN (*ASEAN Centrality*) bukanlah sekadar instrumen taktis, melainkan DNA normatif yang membentuk cara pandang para perumus kebijakan di Jakarta dalam mendefinisikan kepentingan nasional mereka (Anwar, 2020). Konsensus ideologis ini memandang bahwa perdamaian kawasan Asia Tenggara hanya dapat dipertahankan apabila kawasan ini tetap menjadi manajer bagi keamanannya sendiri (*regional security manager*), bukan arena adu kekuatan bagi aktor-aktor ekstra-kawasan.

Berdasarkan fondasi latar belakang empiris dan perdebatan teoretis tersebut, artikel ini menyusun sebuah narasi analitis untuk membongkar pertanyaan sentral: Bagaimana Indonesia mengoperasionalkan strategi *hedging* di tengah meningkatnya tensi geopolitik AS-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, dan sejauh mana strategi ini mampu menjaga otonomi strategis serta kedaulatan maritim nasional tanpa terperangkap dalam ketergantungan asimetris atau konflik militer terbuka? Artikel ini membangun tesis argumentatif bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan nasional kontemporer bukanlah representasi dari kebingungan arah atau keraguan diplomatik (*strategic paralysis*), melainkan cerminan dari strategi *hedging* proaktif berlapis (*multi-tiered proactive hedging*). Portofolio ini secara sadar memadukan penyerapan investasi hilirisasi dan infrastruktur dari Tiongkok dengan diversifikasi institusional Barat, penguatan kapabilitas militer maritim defensif secara mandiri di Laut Natuna Utara, serta kepemimpinan normatif di tingkat regional melalui pelebagaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Kendati demikian, artikel ini secara kritis menunjukkan bahwa strategi *hedging* Indonesia saat ini tengah membentur batas-batas strukturalnya akibat eskalasi operasi zona abu-abu Tiongkok, menguatnya polarisasi aliansi minilateral, serta fragmentasi koordinasi antarelite di tingkat domestik, yang pada gilirannya menuntut rekalisasi mendasar terhadap postur pertahanan maritim dan diplomasi kedaulatan Indonesia ke depan.

METODE PENELITIAN

Kajian dalam artikel jurnal ini dibangun di atas fondasi metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatif yang dirancang untuk mengungkap fenomena sosial-politik internasional secara holistik, mendalam, dan kontekstual (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih secara sadar karena proses perumusan kebijakan luar negeri dan kalkulasi keamanan suatu negara tidak dapat direduksi semata-mata ke dalam agregasi angka kuantitatif. Kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi dialektis yang rumit antara persepsi ancaman elite pengambil keputusan, benturan kepentingan domestik, komitmen normatif historis, serta tekanan anarki struktural sistem internasional. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif-eksplanatif memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan secara terperinci anatomi portofolio kebijakan luar negeri Indonesia, melainkan juga mengeksplanasi mekanisme kausalitas dan motivasi strategis yang mendasari pemilihan instrumen hedging dalam menanggapi polarisasi Indo-Pasifik.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik penelusuran dokumen dan studi kepustakaan intensif (*library research and archival documentary analysis*). Peneliti menghimpun dan menelaah dua kategori korpus data utama, yakni korpus dokumen primer dan data sekunder berbobot tinggi. Korpus dokumen primer mencakup naskah-naskah kebijakan resmi negara, antara lain Dokumen Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dari tahun 2014 hingga 2024, dokumen deklarasi resmi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, naskah kesepakatan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), transkrip pidato kepresidenan, serta naskah doktrin strategi pertahanan resmi dari negara-negara kekuatan besar seperti US Indo-Pacific Strategy yang dirilis oleh Gedung Putih dan dokumen strategi pertahanan nasional Tiongkok. Sementara itu, korpus data sekunder mencakup basis data transfer persenjataan internasional dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), laporan indeks kapabilitas komparatif Lowy Institute Asia Power Index, statistik investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM/Kementerian Investasi RI), laporan kebijakan berkala dari lembaga pemikir terkemuka seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta dan International Institute for Strategic Studies (IISS), serta literatur ilmiah berupa monograf dan artikel jurnal bereputasi internasional dalam disiplin Hubungan Internasional.

Seluruh materi empiris yang terhimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang memadukan tiga alur kegiatan yang bergerak secara siklikal: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan seleksi ketat, pemilahan konseptual, dan abstraksi terhadap ribuan halaman data mentah mengenai transaksi ekonomi, manuver diplomasi, pengadaan sistem persenjataan (*defense procurement*), dan insiden gesekan maritim. Data tersebut kemudian ditata dan disajikan ke dalam tipologi naratif yang merefleksikan pilar-pilar teoretis hedging: dimensi ekonomi, dimensi kelembagaan multilateral, dimensi pertahanan-keamanan maritim, dan dimensi penolakan dominasi hegemoni. Pada tahap penarikan kesimpulan, proposisi analitis diuji secara kritis terhadap realitas empiris untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun terbebas dari bias penafsiran tunggal.

Untuk menjamin derajat keabsahan (*trustworthiness*), keandalan, dan validitas temuan penelitian, studi ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teoretis (Denzin, 2012). Triangulasi sumber dilakukan dengan mengonfrontasikan secara kritis antara klaim retorika resmi pemerintah Indonesia dengan data realisasi anggaran pertahanan, data transfer alutsista SIPRI, laporan insiden maritim dari radar independen, serta laporan investigatif media internasional bereputasi. Sementara itu, triangulasi teoretis dijalankan dengan menguji fenomena empiris yang sama melalui kombinasi perspektif Neorealisme Struktural, Konstruktivisme Identitas, dan Teori Hedging, sehingga mampu menyingkap lapisan motivasi material sekaligus komitmen nilai yang mendasari perilaku negara. Ruang lingkup temporal penelitian ini dibatasi secara spesifik pada kurun waktu 2014 hingga 2024, sebuah dekade krusial yang ditandai oleh konsolidasi kekuasaan Presiden Xi Jinping di Tiongkok, pergeseran postur Indo-Pasifik Amerika Serikat, modernisasi kekuatan maritim Indonesia, serta pengesahan cetak biru AOIP di bawah kepemimpinan diplomatik Indonesia.

PEMBAHASAN

Operasionalisasi strategi hedging Indonesia pada dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari narasi transformasi ekonomi domestik yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak mengambil tampuk kepemimpinan pada tahun 2014, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia mengalami reorientasi pragmatis yang sangat kental, bergeser dari retorika diplomasi citra global (*thousand friends, zero enemies*) menuju diplomasi yang berorientasi hasil nyata (*pro-people diplomacy*) yang diukur secara kuantitatif melalui arus masuk investasi modal, pembangunan infrastruktur fisik, dan industrialisasi bernilai tambah tinggi. Visi Indonesia Emas 2045 menuntut pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, yang pada gilirannya memerlukan modernisasi sistem transportasi antarpulau, pasokan energi yang masif, serta keberanian politik untuk menghentikan ketergantungan historis terhadap ekspor bahan mentah yang selama berabad-abad menempatkan Indonesia pada posisi marjinal dalam rantai nilai global.

Dalam panggung perburuan modal internasional tersebut, Republik Rakyat Tiongkok tampil dengan kapasitas yang tidak tertandingi oleh aktor global lainnya. Di bawah panji inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), Beijing menawarkan likuiditas finansial yang melimpah, kesiapan teknologi konstruksi skala raksasa, serta kecepatan eksekusi proyek tanpa disertai persyaratan prakondisi politik domestik, audit tata kelola hak asasi manusia, atau evaluasi standar lingkungan hidup yang rumit kondisi-kondisi yang selama ini kerap menjadi hambatan birokratis dalam skema pendanaan dari lembaga-lembaga pembiayaan Barat seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB). Mengakui kompatibilitas tersebut, pemerintah Indonesia secara agresif menyelaraskan agenda prioritas Poros Maritim Dunia dengan inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 milik Tiongkok. Hasil dari perkawinan kepentingan ini termanifestasi dalam gelombang investasi Tiongkok yang membanjiri sektor-sektor strategis, terutama proyek infrastruktur transportasi berkecepatan tinggi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (*Whoosh*) serta pembangunan kawasan industri pemrosesan mineral raksasa di berbagai pelosok luar Pulau Jawa.

Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah (Indonesia Morowali Industrial Park / IMIP) dan Teluk Weda di Maluku Utara (Weda Bay Industrial Park / IWIP) menjadi simbol paling nyata dari keberhasilan pragmatisme ekonomi bilateral ini. Melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah (*raw nickel ore ban*) yang diberlakukan secara tegas oleh Jakarta, perusahaan-perusahaan raksasa Tiongkok seperti Tsingshan Holding Group menyuntikkan modal puluhan miliar dolar untuk mendirikan fasilitas pemurnian (*smelter*) berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High-Pressure Acid Leach (HPAL). Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, Indonesia berhasil merevolusi posisi ekonominya dari sekadar pengeksport tanah basah bernilai rendah menjadi produsen baja tahan karat dan rantai pasok nikel olahan terbesar di dunia, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan melipatgandakan penerimaan devisa ekspor negara. Fakta ini menegaskan proposisi mendasar teori hedging Kuik: negara berkembang memanfaatkan momentum keterlibatan ekonomi dengan kekuatan besar penantang semaksimal mungkin demi mengamankan legitimasi politik internal yang bertumpu pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi domestik.

Akan tetapi, narasi keberhasilan geoekonomi ini menyimpan paradoks struktural yang mendalam. Ketergantungan yang teramat tinggi pada modal dan teknologi Tiongkok secara perlahan menciptakan asimetri ketergantungan (*asymmetric interdependence*) yang berpotensi membelenggu ruang gerak otonomi strategis Indonesia. Dominasi kepemilikan saham perusahaan-perusahaan Tiongkok atas ekosistem hilirisasi nikel Indonesia memicu reaksi proteksionisme dari Amerika Serikat dan sekutunya. Ketika pemerintahan Presiden Joe Biden mengesahkan undang-undang penurunan inflasi (*Inflation Reduction Act / IRA*), Washington secara tegas menetapkan bahwa insentif pajak kendaraan listrik di pasar Amerika Serikat hanya berlaku bagi produk-produk yang tidak menggunakan mineral kritis dari "Entitas Asing yang Menjadi Perhatian" (*Foreign Entities of Concern / FEOC*), sebuah terminologi hukum yang ditujukan secara spesifik untuk membatasi korporasi yang dikendalikan oleh entitas Tiongkok. Akibatnya, produk nikel olahan Indonesia yang dihasilkan dari fasilitas peleburan berorientasi Tiongkok terancam terlempar dari pasar baterai kendaraan listrik Amerika Serikat dan sekutu Baratnya. Fenomena ini membuktikan bahwa di era keterikatan geopolitik dan geoekonomi yang kian rapat (*weaponized interdependence*), pragmatisme ekonomi tanpa mitigasi strategis berisiko mengubah mitra investasi menjadi titik kerentanan yang membatasi kedaulatan industri nasional.

Menghadapi ancaman keterjebakan geoekonomi di bawah bayang-bayang Beijing, para arsitek kebijakan luar negeri Indonesia tidak tinggal diam. Sejalan dengan doktrin dasar hedging, Indonesia secara proaktif mengaktifkan instrumen penyeimbang melalui strategi diversifikasi ekonomi dan

pelibatan institusional dengan negara-negara kekuatan ekonomi Barat (institutional binding and economic diversification). Jakarta menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melunakkan tekanan struktural dari undang-undang IRA Amerika Serikat dan menghindari cap subordinasi ekonomi adalah dengan memperlebar pintu kerja sama ekonomi, teknologi, dan investasi dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.

Di kancah hubungan ekonomi multilateral dengan Amerika Serikat, Indonesia secara antusias menyambut inisiasi Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) yang diluncurkan oleh Washington pada Mei 2022. Partisipasi aktif Indonesia dalam empat pilar negosiasi IPEF—mencakup perdagangan yang adil, ketahanan rantai pasok, ekonomi bersih dan dekarbonisasi, serta perpajakan yang adil dan anti-korupsi merupakan langkah kalkulatif untuk memosisikan Indonesia sebagai mitra rantai pasok mineral kritis yang terpercaya (trusted critical minerals partner) bagi industri teknologi tinggi Amerika Serikat. Melalui diplomasi negosiasi bilateral yang intensif, delegasi Indonesia terus memperjuangkan kesepakatan mineral kritis terbatas (Critical Minerals Agreement / CMA) dengan Washington, sebuah instrumen hukum perdagangan yang diharapkan dapat membuka celah regulasi bagi nikel Indonesia untuk memperoleh perlakuan tarif setara di bawah skema subsidi IRA tanpa mengharuskan Indonesia memutus hubungan investasi yang telah berjalan dengan Tiongkok.

Secara simultan, komitmen diversifikasi institusional Indonesia termanifestasi dalam kesepakatan transisi energi triliunan rupiah melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disahkan di sela-sela KTT G20 Bali pada akhir 2022. Didukung oleh konsorsium negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan Jepang, komitmen pendanaan iklim sebesar 20 miliar dolar AS ini mengikatkan transformasi sektor kelistrikan dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara Indonesia pada standar akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola lingkungan hidup berstandar Barat. Kemitraan ini berfungsi sebagai instrumen lindung nilai yang menegaskan bahwa orientasi pembangunan masa depan Indonesia tidak semata-mata berpaling pada model industrialisasi konvensional Tiongkok yang padat emisi, melainkan terintegrasi dengan visi ekonomi hijau global yang dipromosikan oleh negara-negara demokrasi maju.

Langkah diplomatik paling monumental dalam upaya pelembagaan diversifikasi strategis ini ditandai oleh keputusan pemerintah Indonesia untuk secara resmi mengajukan permohonan aksesi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah berani ini mencerminkan ambisi geopolitik Indonesia untuk melompat keluar dari status negara berkembang dan menyejajarkan diri dengan 38 negara berpendapatan tinggi yang menguasai lebih dari 60 persen perekonomian dunia. Proses aksesi OECD menuntut Indonesia untuk merombak ratusan regulasi domestik, memperkuat independensi lembaga peradilan, meningkatkan transparansi pengadaan publik, menaikkan standar perlindungan tenaga kerja, serta memperketat regulasi anti-korupsi dan kepatuhan lingkungan hidup. Dalam perspektif teori hedging, aksesi OECD merupakan bentuk structural hedging tingkat tertinggi. Dengan mengadopsi standar regulasi dan tata kelola liberal-demokratis OECD, Indonesia secara sengaja mengunci sistem kelembagaan domestiknya (locking-in governance mechanisms) agar tetap berlabuh pada arsitektur internasional berbasis aturan yang dipimpin Barat, sekaligus membentengi institusi negaranya dari potensi kooptasi ekonomi otoritarian Tiongkok. Melalui manuver dua arah ini, Indonesia berhasil mempertahankan keseimbangan dinamis: mengoptimalkan modal likuid Tiongkok untuk membangun rel kereta api dan pelabuhan, sembari merengkuh standar regulasi dan kepastian hukum Barat untuk mengamankan kredibilitas globalnya.

Apabila di ruang-ruang perundingan perdagangan dan investasi Indonesia menampilkan wajah akomodatif yang ramah terhadap Beijing, maka di bentangan perairan Laut Natuna Utara, narasi hubungan bilateral kedua negara diwarnai oleh ketegangan geopolitik yang tajam dan tak terelakkan. Paradoks fundamental ini berakar pada pertentangan yuridis yang tidak terdamaikan antara klaim kedaulatan maritim Indonesia berdasarkan hukum internasional modern dan klaim teritorial historis yang dipaksakan oleh Tiongkok. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982) di mana Indonesia dan Tiongkok sama-sama merupakan negara pihak peratifikasi wilayah perairan di sekitar Kepulauan Natuna secara sah merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yurisdiksi Republik Indonesia. Namun demikian, penarikan sepihak peta Ten-Dash Line oleh Beijing memotong secara sepihak wilayah ZEE Indonesia seluas puluhan ribu kilometer persegi dengan dalih bahwa perairan tersebut merupakan "wilayah penangkapan ikan tradisional" (traditional fishing grounds) nelayan Tiongkok sejak zaman dinasti kuno.

Meskipun secara diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia konsisten menyatakan bahwa Indonesia adalah negara non-penuntut (*non-claimant state*) dalam sengketa kedaulatan Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Tiongkok Selatan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kedaulatan maritim Indonesia berada di bawah ancaman nyata. Sejak tahun 2016 hingga paruh pertama dekade 2020-an, Laut Natuna Utara berulang kali menjadi panggung konfrontasi maritim akibat taktik operasi zona abu-abu (*gray-zone operations*) yang dilancarkan oleh Beijing. Taktik ini dijalankan secara terstruktur melalui pengerahan ratusan kapal penangkap ikan nelayan Tiongkok yang beroperasi secara agresif dengan dikawal langsung oleh kapal-kapal patroli berukuran raksasa milik China Coast Guard (CCG)—termasuk monster patroli CCG-5901 berbobot 12.000 ton—serta milisi maritim bersenjata (*People's Armed Forces Maritime Militia / PAFMM*). Kehadiran kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok ini tidak hanya mengintimidasi nelayan-nelayan tradisional Indonesia, melainkan juga secara terang-terangan membayangi dan menuntut penghentian aktivitas pengeboran eksplorasi minyak dan gas bumi lepas pantai yang dilakukan oleh konsorsium migas Indonesia di Blok Tuna.

Menyikapi provokasi maritim yang berulang tersebut, Indonesia menolak tunduk pada tekanan Beijing, namun juga menahan diri untuk tidak membawa sengketa ini ke meja peradilan internasional formal sebagaimana keberanian Filipina mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Permanen pada 2013 karena Jakarta menyadari bahwa konfrontasi terbuka akan menghancurkan relasi kemitraan ekonomi kedua negara. Sebaliknya, Indonesia mengoperasionalkan instrumen penyeimbangan tidak langsung (*indirect balancing*) yang terukur melalui tiga pilar manuver pertahanan yang tegas dan terkalibrasi.

Pertama, restrukturisasi postur komando militer dan penggelaran kekuatan terpadu di kawasan perbatasan terluar. Pemerintah Indonesia membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) yang bermarkas di Tanjungpinang untuk mengintegrasikan kendali operasi trimatra (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) di sektor barat dan utara nusantara. Pangkalan militer terpadu di Kepulauan Natuna diperkuat secara besar-besaran melalui perpanjangan landasan pacu militer di Ranai agar mampu didarati jet-jet tempur garis depan, pembangunan fasilitas pangkalan kapal selam di Selat Lampa, penggelaran sistem radarintai maritim canggih, serta penempatan batalion komposit marinir dan baterai artileri pertahanan pantai. Langkah ini mengirimkan pesan cegah tangkal (*deterrence message*) yang jelas kepada Beijing bahwa Indonesia memiliki kesiapan operasional untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya hingga titik batas terluar.

Kedua, akselerasi dan transformasi radikal dalam pengadaan sistem persenjataan (*defense procurement modernization*). Di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Indonesia melakukan terobosan luar biasa untuk memodernisasi persenjataan militer yang selama bertahun-tahun mengalami penuaan dan ketertinggalan teknologi (*aging military assets*). Menghadapi risiko sanksi hukum penangkalan musuh Amerika melalui sanksi (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act / CAATSA*) yang membuyarkan rencana pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia, Indonesia secara strategis mengalihkan diversifikasi alutsistanya ke negara-negara Barat non-aliansi dan produsen pertahanan terkemuka Eropa. Indonesia menorehkan sejarah dengan menandatangani kontrak pengadaan 42 unit jet tempur multiperan generasi 4.5 Dassault Rafale buatan Prancis, mengamankan nota kesepahaman komitmen persetujuan dari Departemen Luar Negeri AS untuk pembelian hingga 24 unit jet tempur berat F-15EX buatan Boeing, memesan dua unit kapal selam serang canggih kelas Scorpène Evolved bertenaga baterai Full Lithium-Ion dari Naval Group Prancis yang akan dibangun bersama oleh galangan kapal nasional PT PAL di Surabaya, serta mengakuisisi kapal perang fregat berpeluru kendali canggih berdesain Arrowhead-140 dari Babcock Inggris dan Fregat Bergamini dari Fincantieri Italia. Akuisisi alutsista kelas berat bernilai ratusan triliun rupiah ini secara drastis mengubah profil kekuatan militer Indonesia dari postur defensif garis pantai (*brown-water navy*) menuju postur kekuatan laut terbuka berkemampuan proyeksi regional (*green-to-blue water navy*).

Ketiga, internasionalisasi kemitraan latihan tempur maritim tanpa keterikatan aliansi formal. Manifestasi paling mencolok dari instrumen ini adalah transformasi latihan militer bilateral tahunan antara TNI dan Komando Indo-Pasifik AS (*US INDOPACOM*) yang bersandi Garuda Shield. Mulai tahun 2022, latihan ini dielevasi statusnya menjadi latihan multilateral skala raksasa bersandi Super Garuda Shield, yang melibatkan lebih dari 5.000 prajurit gabungan dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, Britania Raya, Prancis, serta belasan negara pengamat lainnya. Latihan tempur yang digelar di berbagai medan simulasi, termasuk pendaratan amfibi di pantai-pantai nusantara dan operasi

perebutan pulau terluar, memperlihatkan tingkat interoperabilitas doktrin dan persenjataan yang sangat tinggi antara militer Indonesia dengan kekuatan-kekuatan militer sekutu Barat. Meskipun Jakarta secara konsisten menegaskan bahwa Super Garuda Shield tidak ditujukan untuk menysasar negara mana pun, latihan multilateral ini secara de facto berfungsi sebagai sinyal penyeimbang yang kredibel untuk menunjukkan kepada Tiongkok bahwa Indonesia memiliki akses dan kemitraan pertahanan yang luas dengan jejaring kekuatan militer global terkuat di dunia.

Pilar keempat dari strategi hedging Indonesia dijalankan melalui ranah diplomasi multilateralisme normatif, di mana Indonesia secara konsisten berjuang mempertahankan doktrin sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality) dan mencegah fragmentasi kawasan menjadi blok-blok militer yang saling bermusuhan. Bagi diplomasi Indonesia, ASEAN bukanlah sekadar forum diskusi regional biasa, melainkan instrumen tata kelola kawasan (regional governance architecture) yang berfungsi sebagai penyangga diplomatik utama (diplomatic shield) yang melindungi negara-negara Asia Tenggara dari dominasi kekuatan hegemonik tunggal (Anwar, 2020). Doktrin ini meyakini bahwa persatuan kolektif sepuluh negara Asia Tenggara di dalam mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN (ASEAN-led mechanisms) merupakan prasyarat mutlak bagi terpeliharanya stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Akan tetapi, fondasi sentralitas ASEAN ini diguncang hebat oleh kemunculan inisiatif-inisiatif pertahanan minilateral eksklusif yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Pengumuman pembentukan pakta militer AUKUS pada September 2021—yang mencakup rencana transfer teknologi kapal selam serang bertenaga nuklir dari AS dan Inggris kepada Australia—memantik keprihatinan diplomatik yang sangat mendalam di Jakarta. Para pembuat kebijakan di Pejambon (Kementerian Luar Negeri RI) memandang AUKUS sebagai perkembangan berbahaya yang mengancam stabilitas strategis kawasan, berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir regional (regional nuclear proliferation), serta mereduksi posisi sentral ASEAN menjadi sekadar penonton pasif di halaman rumahnya sendiri. Begitu pula dengan penguatan forum dialog Quad, yang dinilai merefleksikan kecurigaan negara-negara Barat terhadap efektivitas mekanisme ASEAN yang dianggap lamban, birokratis, dan tidak berdaya menghadapi keagresifan militer Tiongkok.

Menghadapi ancaman marginalisasi institusional tersebut, Indonesia menolak menyerah pada arus polarisasi minilateralisme Barat maupun hegemoni sepihak Tiongkok. Sebaliknya, Indonesia meluncurkan serangan balik diplomatik yang visioner dengan memprakarsai lahirnya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang berhasil disahkan sebagai dokumen konsensus bersama oleh para pemimpin negara anggota pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok tahun 2019. Inisiasi AOIP merupakan karya diplomasi monumental Indonesia yang berhasil mengarahkan narasi Indo-Pasifik—yang sebelumnya sarat dengan aroma pembendungan militer dan kontestasi biner ala Amerika Serikat—kembali ke dalam bingkai kerja sama inklusif berprinsip Asia Tenggara.

Secara filosofis dan operasional, AOIP dibangun di atas empat premis normatif yang sangat strategis. Pertama, mengubah paradigma keamanan kawasan dari logika pertarungan berbasis eksklusi (zero-sum game) menuju logika kerja sama keterbukaan yang saling menguntungkan (positive-sum cooperation). Kedua, menegaskan kembali prinsip bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak boleh dipecah-belah oleh pembentukan aliansi-aliansi militer yang saling bermusuhan, melainkan harus tetap mempertahankan arsitektur terbuka yang merangkul seluruh aktor kekuatan besar di dalam satu meja perundingan bersama. Ketiga, mereafirmasi peran sentral ASEAN sebagai pengemudi utama (driving force) dalam mengelola stabilitas kawasan melalui pemanfaatan mekanisme dialog inklusif yang telah mapan, seperti East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), dan ASEAN Defense Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus). Keempat, mengalihkan fokus persaingan kekuatan besar dari kontestasi militer kinetik menuju kolaborasi fungsional nyata di empat bidang prioritas: konektivitas maritim, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pencapaian target-target lingkungan hidup (SDGs), serta kerja sama ekonomi digital dan teknologi.

Relevansi kepemimpinan normatif Indonesia semakin berkilau ketika Indonesia memegang mandat Keketuaan ASEAN sepanjang tahun 2023. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia berhasil mewujudkan amanat normatif AOIP ke dalam bentuk kerja sama nyata dengan menyelenggarakan perhelatan akbar ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) di Jakarta. Forum tingkat tinggi ini berhasil mempertemukan para pemimpin pemerintahan dan korporasi multinasional dari negara-negara anggota ASEAN, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga negara-negara Eropa, serta membukukan komitmen proyek konkret bernilai puluhan miliar dolar di sektor energi hijau, rantai pasok digital, dan konektivitas logistik

pelabuhan. Melalui AOIP dan AIPF, Indonesia berhasil mengoperasionalkan instrumen dominance-denial dan binding-engagement secara brilian: menolak wilayah perairannya dijadikan proksi medan perang adidaya, sembari mengikat Amerika Serikat dan Tiongkok ke dalam arsitektur tata kelola regional yang terlembagakan dan transparan di bawah payung sentralitas ASEAN.

Meskipun secara konseptual dan diplomatik strategi hedging Indonesia tampak sebagai arsitektur kebijakan luar negeri yang sangat ideal dan fleksibel, analisis kritis yang objektif membuktikan bahwa strategi ini sesungguhnya berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Efektivitas strategi hedging Indonesia saat ini tengah membentur batas-batas strukturalnya (*structural limitations*), yang bersumber dari dialektika pertentangan di tiga level analisis: level domestik, level interaksi bilateral kekuatan besar, dan level integritas institusional kawasan. Di level domestik, kelemahan mendasar dari strategi hedging Indonesia berakar pada adanya fragmentasi orientasi kepentingan dan koordinasi antarelite pengambil kebijakan (*domestic political fragmentation*). Perumusan kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia tidak selalu berjalan dalam satu irama yang harmonis. Terdapat dikotomi laten antara faksi teknokrat ekonomi dan korporasi bisnis—yang dipimpin oleh kementerian-kementerian sektor ekonomi dan kemaritiman-investasi—dengan faksi diplomat karir di Kementerian Luar Negeri serta faksi pertahanan-keamanan di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Faksi ekonomi cenderung bersikap sangat akomodatif terhadap Beijing demi menjamin kelancaran arus modal investasi smelter dan pinjaman infrastruktur, sehingga kerap meremehkan atau meminimalisasi bobot ancaman intrusi maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara agar sentimen pasar tidak terganggu. Sebaliknya, faksi diplomatik dan pertahanan sangat mengkhawatirkan erosi integritas kedaulatan teritorial dan pembentukan asimetri ketergantungan yang dapat mengisolasi Indonesia dari jejaring mitra Barat. Ketidadaan sebuah mekanisme koordinasi strategis tunggal yang mengikat (*national security council*) kerap melahirkan sinyal diplomatik yang ambigu dan inkonsisten ke panggung internasional, memperlemah daya tawar dan wibawa pencegahan (*deterrence credibility*) Indonesia di mata Tiongkok maupun Amerika Serikat.

Di level interaksi bilateral, strategi hedging Indonesia menghadapi batas toleransi dari kekuatan-kekuatan besar terhadap praktik ambiguitas strategis (*strategic ambiguity*). Strategi lindung nilai hanya dapat bertahan sepanjang kekuatan-kekuatan adidaya bersedia membiarkan negara berkembang bermanuver di wilayah netral abu-abu. Namun, seiring dengan semakin terpolarisasinya tatanan dunia pasca-invasi Rusia ke Ukraina dan meruncingnya ketegangan lintas Selat Taiwan, ruang toleransi tersebut semakin menyempit drastis. Washington secara bertahap menuntut keselarasan geopolitik (*geopolitical alignment*) dan keselarasan teknologi (*technological decoupling*) dari negara-negara mitranya, memperingatkan bahwa negara yang enggan berpihak pada arsitektur rantai pasok demokrasi Barat akan kehilangan akses terhadap inovasi semikonduktor masa depan. Pada saat yang sama, Beijing tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengendurkan agresivitas taktik zona abu-abunya di Laut Natuna Utara. Pengerahan kapal-kapal penjaga pantai bersenjata berat Tiongkok secara terus-menerus mengikis kedaulatan *de facto* Indonesia, menempatkan Jakarta pada posisi yang serba salah: merespons dengan kekerasan militer akan menghancurkan relasi ekonomi, sementara membiarkannya akan menciptakan preseden hilangnya yurisdiksi maritim secara permanen. Jika konflik kinetik terbuka meletus di Selat Taiwan atau Laut Tiongkok Selatan, ambiguitas hedging Indonesia akan runtuh seketika, memaksa Jakarta untuk menghadapi ujian eksistensial mengenai bagaimana mempertahankan kelangsungan ekonomi tanpa membiarkan wilayah laut kedaulatannya diinvasi oleh salah satu kekuatan adidaya.

Di level regional, batas paling memprihatinkan bagi keberlanjutan strategi hedging Indonesia adalah terjadinya erosi solidaritas internal dan polarisasi di dalam tubuh ASEAN itu sendiri. Sentralitas ASEAN hanya dapat menjadi perisai yang berwibawa apabila ASEAN mampu berbicara dan bertindak sebagai satu kesatuan geopolitik yang solid (*collective geopolitical actor*). Realitas kontemporer memperlihatkan bahwa infiltrasi pengaruh kekuatan besar telah berhasil meretakkan kesatuan tersebut dari dalam. Di satu sisi, negara-negara seperti Kamboja dan Laos telah terikat sedemikian dalam oleh ketergantungan finansial dan infrastruktur terhadap Beijing, sehingga berulang kali memveto konsensus bersama ASEAN terkait klausul penegakan hukum laut dan kecaman terhadap militerisasi Laut Tiongkok Selatan. Di sisi berseberangan, Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mereorientasikan doktrin pertahanannya secara radikal menuju penguatan aliansi militer terbuka dengan Amerika Serikat, membuka akses pangkalan militer baru di bawah perjanjian EDCA, serta secara aktif melakukan konfrontasi fisik terhadap kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok di Beting Scarborough dan Beting Thomas Kedua. Polarisasi internal yang tajam ini memperlihatkan bahwa

konsensus sentralitas ASEAN yang diperjuangkan Indonesia kian terdegradasi menjadi sekadar jargon normatif di atas kertas, kehilangan gigi operasionalnya untuk meredam konflik nyata. Akibatnya, Indonesia tidak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan ASEAN sebagai instrumen lindung nilai kolektif, melainkan dipaksa untuk memikul beban pembendungan risiko secara mandiri melalui peningkatan kapabilitas militer internal dan diplomasi bilateral yang berbiaya tinggi.

PENUTUP

Kajian komprehensif ini menyimpulkan bahwa postur kebijakan luar negeri dan pertahanan Republik Indonesia dalam menghadapi turbulensi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik merupakan manifestasi nyata dari strategi hedging proaktif berlapis (multi-tiered proactive hedging). Penolakan konsisten Indonesia untuk beraliansi secara militer dengan Amerika Serikat ataupun tunduk pada hegemoni regional Tiongkok bukanlah representasi dari kepasifan, ketidaktegasan, atau keraguan diplomatik (strategic indecision). Sebaliknya, manuver tersebut merupakan kalkulasi rasional berbasis mitigasi risiko (risk-offsetting calculus) yang berakar kokoh pada mandat historis doktrin politik luar negeri Bebas-Aktif, yang ditujukan untuk memaksimalkan otonomi strategis serta menjaga kedaulatan wilayah di tengah badai polarisasi kekuatan besar. Operasionalisasi strategi hedging Indonesia bertumpu secara harmonis pada portofolio empat pilar tindakan: Pertama, penyerapan pragmatisme ekonomi bilateral secara masif dari Tiongkok melalui proyek hilirisasi industri nikel dan pembangunan infrastruktur konektivitas strategis demi menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional; Kedua, penyeimbangan institusional terhadap blok Barat melalui keterlibatan aktif dalam kerangka perdagangan IPEF, kemitraan transisi energi terbarukan JETP, serta komitmen reformasi tata kelola struktural melalui akses resmi keanggotaan OECD; Ketiga, pelaksanaan penyeimbangan defensif tidak langsung (indirect balancing) melalui akselerasi akuisisi alutsista maritim dan kedirgantaraan canggih buatan negara-negara Barat non-aliansi (jet tempur Rafale, F-15EX, kapal selam Scorpène) serta penguatan pangkalan militer dan perluasan latihan tempur gabungan Super Garuda Shield untuk menangkal ancaman di Laut Natuna Utara; Keempat, pemancangan kepemimpinan normatif di tingkat regional melalui pengesahan dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) guna mempertahankan sentralitas ASEAN sebagai manajer arsitektur keamanan kawasan yang inklusif.

Kendati demikian, artikel ini menegaskan bahwa strategi hedging bukanlah obat mujarab yang bebas risiko. Keberlanjutan strategi ini saat ini tengah menghadapi ancaman batas struktural yang serius. Fragmentasi koordinasi kebijakan antarelite domestik, ketidaktoleranan kekuatan adidaya terhadap ambiguitas posisi netral di era persaingan teknologi, agresivitas taktik zona abu-abu Tiongkok di perairan Natuna Utara, serta terbelahnya solidaritas internal ASEAN membuktikan bahwa otonomi strategis tidak dapat dirawat hanya dengan mengandalkan kelihaihan bersilat lidah di meja diplomasi, melainkan menuntut konsolidasi ketahanan nasional yang solid dan terintegrasi.

Bertolak dari kesimpulan analitis di atas, artikel ini merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan yang mendesak bagi para perumus strategi luar negeri dan pertahanan Republik Indonesia ke depan: Pertama, reformasi dan unifikasi tata kelola keamanan maritim nasional secara terpadu. Pemerintah Indonesia harus segera menuntaskan dualisme dan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut dengan mentransformasikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi badan penjaga pantai tunggal yang berkemampuan multimisi (single agency multi-tasks coast guard) yang memiliki payung hukum kuat dan armada kapal patroli berbobot besar. Koherensi komando ini mutlak diperlukan untuk mengimbangi operasi zona abu-abu China Coast Guard di ZEE Natuna Utara secara gigih tanpa harus melibatkan kapal perang TNI Angkatan Laut secara prematur yang berisiko memicu eskalasi militer terbuka. Kedua, transformasi implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dari sekadar instrumen normatif menjadi portofolio proyek strategis yang nyata. Indonesia harus memimpin pembentukan konsorsium pendanaan infrastruktur maritim terintegrasi berbasis ASEAN yang menggandeng kekuatan-kekuatan menengah (middle powers) seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Kanada, dan Uni Eropa, sehingga negara-negara Asia Tenggara memiliki alternatif pembiayaan yang kredibel di luar bayang-bayang utang Tiongkok maupun pakta militer Barat. Ketiga, penguatan kemandirian industri pertahanan dalam negeri melalui integrasi alih teknologi yang ketat. Seluruh kontrak pengadaan persenjataan bernilai besar dari Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris harus dipastikan menyertakan klausul transfer teknologi, lokalisasi suku cadang, dan penguasaan kode sumber

(source code) bagi industri pertahanan nasional seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia. Penguatan kapabilitas domestik ini merupakan prasyarat esensial agar otonomi strategis Indonesia tidak lumpuh akibat ancaman embargo atau pemutusan rantai pasok persenjataan ketika krisis geopolitik regional meletus di masa mendatang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal fokus spasial dan temporal yang terkonsentrasi pada analisis makro kebijakan negara Indonesia sepanjang periode 2014 hingga 2024. Perkembangan suksesi kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto pasca-pemilu 2024, dinamika hasil pemilu kepresidenan Amerika Serikat, serta pergeseran orientasi kepemimpinan ekonomi internal Tiongkok dipastikan akan mengubah variabel-variabel strategis secara dinamis. Oleh karena itu, agenda riset mendatang sangat direkomendasikan untuk meneliti: evaluasi mikro terhadap integrasi doktrin pertahanan baru Indonesia di bawah kepemimpinan kabinet baru, analisis komparatif dinamika strategi hedging antara Indonesia dan Vietnam dalam menghadapi taktik zona abu-abu Tiongkok, serta pemodelan skenario kontinjensi mitigasi krisis energi dan pangan nasional apabila pecah konflik bersenjata terbuka di Selat Taiwan yang melumpuhkan jalur navigasi laut di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (3rd ed.). London: Routledge.
- Allison, G. (2017). *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1), 111–129. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2023). *Navigating the Indo-Pacific Minilateral Architecture: Implications for Southeast Asia*. Jakarta: CSIS Indonesia Policy Report.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2012). The politics of evidence. In *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (pp. 641–658). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Goh, E. (2005). *Meeting the China Challenge: The Complex Hedging in Southeast Asia*. Washington, DC: East-West Center Washington.
- Hatta, M. (1948). *Mendayung Antara Dua Karang: Keterangan Pemerintah Diutjapkan di Muka Sidang B.P. K.N.I.P. di Jogjakarta*. Djakarta: Bulan Bintang.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (PPTM) 2020*. Jakarta: Kemlu RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemenhan RI.
- Kuik, C.-C. (2008). The essence of hedging: Malaysia and Singapore's response to a rising China. *Contemporary Southeast Asia*, 30(2), 159–185. <https://doi.org/10.1355/cs30-2a>
- Kuik, C.-C. (2016). How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior towards China. *Journal of Contemporary China*, 25(100), 500–514. <https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1132645>
- Laksmana, E. A. (2021). Spoilers from within? ASEAN and the limits of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Asia Policy*, 16(4), 117–124.
- Lowy Institute. (2023). *Asia Power Index 2023 Edition*. Sydney: Lowy Institute for International Policy.
- Mastro, O. S. (2019). The stealth superpower: How China hid its global ambitions. *Foreign Affairs*, 98(1), 31–39.
- Mearsheimer, J. J. (2019). Bound to fail: The rise and fall of the liberal international order. *International Security*, 43(4), 7–50. https://doi.org/10.1162/isec_a_00342

- Medeiros, E. S. (2020). The changing fundamentals of US-China relations. *The Washington Quarterly*, 42(3), 93–119.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Nabbs-Keller, G. (2020). Understanding Indonesia's national security posture: Geopolitical shift and institutional fragmentation. *The Pacific Review*, 33(5), 785–815.
- Pangestu, M., & Armstrong, S. (2022). Economic architecture in the Indo-Pacific: Institutional competition and coherence. *Asian Economic Policy Review*, 17(1), 3–22.
- Permal, S. (2021). The militarisation of the South China Sea and its implications for maritime security in the Indo-Pacific. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 17(1), 22–34.
- Sebastian, L. C., & Syailendra, E. A. (2022). Indonesia's defense diplomacy: Harnessing partnerships amidst Indo-Pacific polarization. *Asian Security*, 18(2), 134–153. <https://doi.org/10.1080/14799855.2021.2014022>
- Schweller, R. L. (1994). Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in. *International Security*, 19(1), 72–107.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2023). *Trends in International Arms Transfers, 2022*. Solna: SIPRI Fact Sheet.
- Sukma, R. (2020). Indonesia's contestation of the Indo-Pacific: From vision to ASEAN Outlook. *Journal of East Asian Studies*, 20(3), 437–456.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading: Addison-Wesley.
- Weatherbee, D. E. (2019). *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy* (3rd ed.). Lanham: Rowman & Littlefield.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wong, R. (2022). Model of pragmatic partnership: China-Indonesia economic relations in the BRI era. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 11(2), 241–265. <https://doi.org/10.1080/24761028.2022.2140412>